

INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM



Perjanjian Kinerja

Tahun Anggaran 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : THOLIB
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAZILU
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2021

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

RAZILU
NIP.19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,
Sekretaris Inspektorat Jenderal

THOLIB
NIP.19630811 198811 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL DENGAN INSPEKTUR JENDERAL

| Sasaran Program (SP) Dukungan Manajemen Unit Inspektorat Jenderal | Indikator Kinerja Utama | Target |
|---|--|-----------------------|
| SP-05 Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel | IKP-01 1. Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM | WTP |
| SP-06 Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM | IKP-01 2. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM | Level 3 - Terdefinisi |
| SP-07 Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis Teknologi Informasi | IKP-01 3. Persentasi Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal "BB" | 93 % |
| | IKP-02 4. Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 90 | 93 % |
| | IKP-03 5. Persentase Satuan Kerja yang Berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM | 6 % |
| | IKP-04 6. Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM | 67,0 |

| No. | Sasaran Kegiatan (SK) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM | Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM | Target |
|-------|--|---|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| SK-13 | Terimplementasinya Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar untuk Meningkatkan Integritas Kemenkumham | 1. Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) untuk Meningkatkan Integritas Kementerian Hukum dan HAM | satu Rekomendasi |
| | | 2. Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM | 67,0 |
| SK-14 | Mengoptimalkan Efektivitas Penyelenggaraan Tata Kelola | 1. Indeks RB ITJEN | 34,92 |

| No. | Sasaran Kegiatan (SK) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM | Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM | Target |
|-------|--|---|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal | 2. Nilai SAKIP ITJEN "Baik" | 82,89 |
| | | 3. Nilai Maturitas SPIP ITJEN | Level 3 (Terdefinisi) |
| SK-15 | Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal yang Berkualitas, Berintegritas dan Profesional | 1. Presentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi | 85 % |
| | | 2. Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham | 4 |
| SK-16 | Mengembangkan Kualitas Sistem Informasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Andal dan Responsif | 1. Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/Pengendalian Internal | 84 % |
| SK-17 | Terwujudnya Layanan Kantor yang Akuntabel | 1. Persentase Realisasi Layanan Perkantoran yang Akuntabel | 87 % |
| | | 2. Jumlah Layanan Fasilitas Kerumahtanggaan, BMN, dan Sarana Prasarana Internal | 12 bulan layanan |
| SK-18 | Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Inspektorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel | 1. Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel | WTP |
| | | 2. Persentase Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Inspektorat Jenderal | 88 % |
| | | 3. Persentase Rekomendasi atas Penyusunan RKA-KL ITJEN yang Ditindaklanjuti | 96 % |

Keterangan: Target Perjanjian Kinerja berdasarkan Rencana Kerja TA.2022

| No. | Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM | Anggaran |
|-----|--|---------------------|
| 1. | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM | Rp.38.770.436.000,- |
| | Sasaran Kegiatan (SK-13) Terimplementasinya Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar | Rp. 639.622.000,- |
| | Sasaran Kegiatan (SK-14) Mengoptimalkan Efektivitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal | Rp. 3.711.389.000,- |

| | |
|--|----------------------|
| Sasaran Kegiatan (SK-15) Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal yang Berkualitas, Berintegritas dan Profesional | Rp. 1.470.818.000,- |
| Sasaran Kegiatan (SK-16) Mengembangkan Kualitas Sistem Informasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Andal dan Responsif | Rp. 789.328.000,- |
| Sasaran Kegiatan (SK-17) Terwujudnya Layanan Kantor yang Akuntabel | Rp. 31.601.886.000,- |
| Sasaran Kegiatan (SK-18) Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Inspektorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel | Rp. 557.393.000,- |

Sumber data : DIPA ITJEN Th.2022 Nomor DIPA-013.02-0/2022 Tanggal 17 November 2021

Digital Stamp Nomor DS: 0962-8995-2985-8400

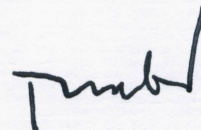
Jakarta, 31 Desember 2021

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal



RAZILU
NIP.19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,
Sekretaris Inspektorat Jenderal



THOLIB
NIP.19630811 198811 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTUR WILAYAH I**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD RIFAI
Jabatan : Inspektur Wilayah I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAZILU
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2021

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

RAZILU
NIP. 19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah I

AHMAD RIFAI
NIP. 19621213 198603 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTUR WILAYAH I DENGAN INSPEKTUR JENDERAL**

| Sasaran Program (SP) Dukungan Manajemen Unit Inspektorat Jenderal | Indikator Kinerja Utama | Target |
|---|--|--------------------------|
| SP-05 Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel | IKP-01 1. Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM | WTP |
| SP-06 Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM | IKP-01 2. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM | Level 3 (Terdefinisi) |
| SP-07 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis Teknologi Informasi | IKP-01 3. Persentasi Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal "BB" | 93 % |
| | IKP-02 4. Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 90 | 93 % |
| | IKP-03 5. Persentase Satuan Kerja yang Berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM | 6 % |
| | IKP-04 6. Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM | 67,0 |

| No. | Sasaran Kegiatan (SK) Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I | Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I | Target |
|-----|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | SK-1 dan SK-2: Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui <i>pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR)</i> untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM | 1. Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham 2. Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I 3. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I 4. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait | 3 (integrated) 56 % 66 % 86 % |

| No. | Sasaran Kegiatan (SK) Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I | Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I | Target |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I | |
| | | 5. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I | 26 % |
| | | 6. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I | 80 % |
| | | 7. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL I yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM | 6,0 % |

Keterangan: Target Perjanjian Kinerja berdasarkan Rencana Kerja TA.2022

| No. | Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I | Anggaran |
|-----|--|---------------------------|
| 1. | Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I | Rp.5.599.719.000,- |
| | Sasaran Kegiatan (SK-1 dan SK-2) : Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM | Rp. 5.599.719.000,- |

Sumber data : DIPA ITJEN Th.2022 Nomor DIPA-013.02-0/2022 Tanggal 17 November 2021

Digital Stamp Nomor DS: 0962-8995-2985-8400

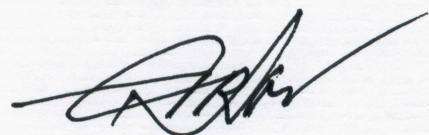
Jakarta, 31 Desember 2021

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal



RAZILU
NIP. 19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah I



AHMAD RIFAI
NIP. 19621213 198603 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 INSPEKTUR WILAYAH II

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ICON SIREGAR
Jabatan : Inspektur Wilayah II

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAZILU
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2021

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

RAZILU
NIP. 19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah II

ICON SIREGAR
NIP.19630417 198303 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTUR WILAYAH II DENGAN INSPEKTUR JENDERAL**

| Sasaran Program (SP) Dukungan Manajemen Unit Inspektorat Jenderal | Indikator Kinerja Utama | Target |
|---|--|--------------------------|
| SP-05 Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel | IKP-01 1. Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM | WTP |
| SP-06 Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM | IKP-01 2. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM | Level 3 (Terdefinisi) |
| SP-07 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis Teknologi Informasi | IKP-01 3. Persentasi Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal "BB" | 93 % |
| | IKP-02 4. Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 90 | 93 % |
| | IKP-03 5. Persentase Satuan Kerja yang Berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM | 6 % |
| | IKP-04 6. Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM | 67,0 |

| No. | Sasaran Kegiatan (SK) Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II | Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II | Target |
|-----|--|---|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | SK-3 dan SK-4: Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM | 1. Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham | 3 (integrated) |
| | | 2. Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II | 56 % |
| | | 3. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II | 66 % |
| | | 4. Persentase Peningkatan Pengelolaan | 86 % |

| No. | Sasaran Kegiatan (SK) Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II | Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II | Target |
|-----|---|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II | |
| | | 5. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II | 26 % |
| | | 6. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II | 80 % |
| | | 7. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL II yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM | 6,0 % |

Keterangan: Target Perjanjian Kinerja berdasarkan Rencana Kerja TA.2022

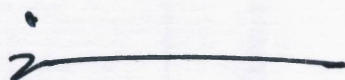
| No. | Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II | Anggaran |
|-----|--|---------------------------|
| 1. | Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II | Rp.5.599.719.000,- |
| | Sasaran Kegiatan (SK-3 dan SK-4) : Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM | Rp. 5.599.719.000,- |

Sumber data : DIPA ITJEN Th.2022 Nomor DIPA-013.02-0/2022 Tanggal 17 November 2021

Digital Stamp Nomor DS: 0962-8995-2985-8400

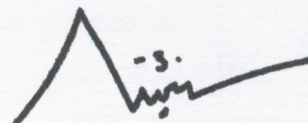
Jakarta, 31 Desember 2021

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal



RAZILU
NIP. 19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah II



ICON SIREGAR
NIP.19630417 198303 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTUR WILAYAH III**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KHAIRUDDIN
Jabatan : Inspektur Wilayah III

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAZILU
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2021

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah III

RAZILU
NIP. 19651128 199103 1 002

KHAIRUDDIN
NIP. 19620201 199003 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTUR WILAYAH III DENGAN INSPEKTUR JENDERAL**

| Sasaran Program (SP) Dukungan Manajemen Unit Inspektorat Jenderal | Indikator Kinerja Utama | Target |
|---|--|--------------------------|
| SP-05 Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel | IKP-01 1. Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM | WTP |
| SP-06 Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM | IKP-01 2. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM | Level 3 (Terdefinisi) |
| SP-07 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis Teknologi Informasi | IKP-01 3. Persentasi Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal "BB" | 93 % |
| | IKP-02 4. Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 90 | 93 % |
| | IKP-03 5. Persentase Satuan Kerja yang Berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM | 6 % |
| | IKP-04 6. Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM | 67,0 |

| No. | Sasaran Kegiatan (SK) Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III | Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III | Target |
|-----|---|--|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | SK-5 dan SK-6 Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM | 1. Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham | 3 (integrated) |
| | | 2. Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III | 56 % |
| | | 3. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III | 66 % |
| | | 4. Persentase Peningkatan Pengelolaan | 86 % |

| No. | Sasaran Kegiatan (SK) Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III | Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III | Target |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III | |
| | | 5. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III | 26 % |
| | | 6. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III | 80 % |
| | | 7. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL III yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM | 6,0 % |

Keterangan: Target Perjanjian Kinerja berdasarkan Rencana Kerja TA.2022

| No. | Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III | Anggaran |
|-----|--|---------------------------|
| 1. | Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III | Rp.5.599.719.000,- |
| | Sasaran Kegiatan (SK-5 dan SK-6) : Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM | Rp.5.599.719.000,- |

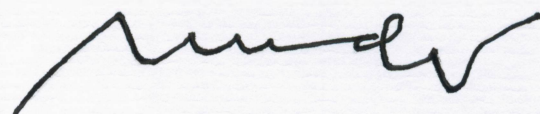
Sumber data : DIPA ITJEN Th.2022 Nomor DIPA-013.02-0/2022 Tanggal 17 November 2021

Digital Stamp Nomor DS: 0962-8995-8400

Jakarta, 31 Desember 2021

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah III

RAZILU
NIP. 19651128 199103 1 002

KHAIRUDDIN
NIP. 19620201 199003 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTUR WILAYAH IV**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LULUK RATNANINGTYAS
Jabatan : Inspektur Wilayah IV

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAZILU
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2021

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah IV

RAZILU
NIP.19651128 199103 1 002

LULUK RATNANINGTYAS
NIP.19631001 199103 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTUR WILAYAH IV DENGAN INSPEKTUR JENDERAL**

| Sasaran Program (SP) Dukungan Manajemen Unit Inspektorat Jenderal | Indikator Kinerja Utama | Target |
|---|--|--------------------------|
| SP-05 Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel | IKP-01 1. Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM | WTP |
| SP-06 Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM | IKP-01 2. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM | Level 3 (Terdefinisi) |
| SP-07 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis Teknologi Informasi | IKP-01 3. Persentasi Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal "BB" | 93 % |
| | IKP-02 4. Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 90 | 93 % |
| | IKP-03 5. Persentase Satuan Kerja yang Berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM | 6 % |
| | IKP-04 6. Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM | 67,0 |

| No. | Sasaran Kegiatan (SK) Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV | Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV | Target |
|-----|--|---|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | SK-7 dan SK-8: Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM | 1. Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham | 3 (integrated) |
| | | 2. Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV | 56 % |
| | | 3. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV | 9 % |
| | | 4. Persentase Peningkatan Pengelolaan | 86 % |

| No. | Sasaran Kegiatan (SK) Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV | Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV | Target |
|-----|---|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV | |
| | | 5. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV | 26 % |
| | | 6. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV | 35 % |
| | | 7. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL IV yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM | 6,0 % |

Keterangan: Target Perjanjian Kinerja berdasarkan Rencana Kerja TA.2022

| No. | Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV | Anggaran |
|-----|--|---------------------------|
| 1. | Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV | Rp.5.599.719.000,- |
| | Sasaran Kegiatan (SK-7 dan SK-8) : Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM | Rp.5.599.719.000,- |

Sumber data : DIPA ITJEN Th.2022 Nomor DIPA-013.02-0/2022 Tanggal 17 November 2021

Digital Stamp Nomor DS: 0962-8995-2985-8400

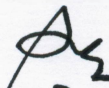
Jakarta, 31 Desember 2021

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal



RAZILU
NIP.19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah IV



LULUK RATNANINGTYAS
NIP.19631001 199103 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 INSPEKTUR WILAYAH V

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BUDI
Jabatan : Inspektur Wilayah V

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAZILU
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2021

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

RAZILU
NIP.19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah V

BUDI
NIP.19621125 198903 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTUR WILAYAH V DENGAN INSPEKTUR JENDERAL**

| Sasaran Program (SP) Dukungan Manajemen Unit Inspektorat Jenderal | Indikator Kinerja Utama | Target |
|---|--|--------------------------|
| SP-05 Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel | IKP-01 1. Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM | WTP |
| SP-06 Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM | IKP-01 2. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM | Level 3 (Terdefinisi) |
| SP-07 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis Teknologi Informasi | IKP-01 3. Persentasi Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal "BB" | 93 % |
| | IKP-02 4. Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 90 | 93 % |
| | IKP-03 5. Persentase Satuan Kerja yang Berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM | 6 % |
| | IKP-04 6. Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM | 67,0 |

| No. | Sasaran Kegiatan (SK) Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V | Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V | Target |
|-----|---|--|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | SK-9 dan SK-10: Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM | 1. Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham | 3 (integrated) |
| | | 1. Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V | 56 % |
| | | 2. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V | 61 % |
| | | 3. Persentase Peningkatan Pengelolaan | 86 % |

| No. | Sasaran Kegiatan (SK) Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V | Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V | Target |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V | |
| | | 4. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V | 26 % |
| | | 5. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V | 80 % |
| | | 6. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL V yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM | 6,0 % |

Keterangan: Target Perjanjian Kinerja berdasarkan Rencana Kerja TA.2022

| No. | Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V | Anggaran |
|-----|---|---------------------------|
| 1. | Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V | Rp.5.599.719.000,- |
| | Sasaran Kegiatan (SK-9 dan SK-10) : Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM | Rp.5.599.719.000,- |

Sumber data : DIPA ITJEN Th.2022 Nomor DIPA-013.02-0/2022 Tanggal 17 November 2021

Digital Stamp Nomor DS: 0962-8995-2985-8400

Jakarta, 31 Desember 2021

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal



RAZILU
NIP.19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah V



BUDI
NIP.19621125 198903 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 INSPEKTUR WILAYAH VI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARASIDIN
Jabatan : Inspektur Wilayah VI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAZILU
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2021

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah VI

RAZILU
NIP.19651128 199103 1 002

MARASIDIN
NIP. 19640425 199001 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTUR WILAYAH VI DENGAN INSPEKTUR JENDERAL**

| Sasaran Program (SP) Dukungan Manajemen Unit Inspektorat Jenderal | Indikator Kinerja Utama | Target |
|---|--|--------------------------|
| SP-05 Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel | IKP-01 1. Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM | WTP |
| SP-06 Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM | IKP-01 2. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM | Level 3 (Terdefinisi) |
| SP-07 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis Teknologi Informasi | IKP-01 3. Persentasi Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal "BB" | 93 % |
| | IKP-02 4. Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 90 | 93 % |
| | IKP-03 5. Persentase Satuan Kerja yang Berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM | 6 % |
| | IKP-04 6. Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM | 67,0 |

| No. | Sasaran Kegiatan (SK) Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI | Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI | Target |
|-----|--|---|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | SK-11 dan SK-12: Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM | 1. Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham | 3 (integrated) |
| | | 2. Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI | 56 % |
| | | 3. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI | 66 % |
| | | 4. Persentase Peningkatan Pengelolaan | 62 % |

| No. | Sasaran Kegiatan (SK) Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI | Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI | Target |
|-----|---|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI | |
| | | 5. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI | 26 % |
| | | 6. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI | 80 % |
| | | 7. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL VI yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM | 6,0 % |

Keterangan: Target Perjanjian Kinerja berdasarkan Rencana Kerja TA.2022

| No. | Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI | Anggaran |
|-----|--|-----------------------------|
| 1. | Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI | Rp. 10.107.977.000,- |
| | Sasaran Kegiatan (SK-11 dan SK-12) : Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM | Rp. 10.107.977.000,- |

Sumber data : DIPA ITJEN Th.2022 Nomor DIPA-013.02-0/2022 Tanggal 17 November 2021

Digital Stamp Nomor DS: 0962-8995-2985-8400

Jakarta, 31 Desember 2021

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal



RAZILU
NIP.19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah VI



MARASIDIN
NIP. 19640425 199001 1 001